

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Adanya Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan potensi yang dimiliki dalam rangka membangun dan mengembangkan, pengendalian dan evaluasi, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan semua daerahnya. Dalam QS. Al-Shaff ayat 4 berikut:

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”*.

Maksud dari ayat diatas adalah menyuruh masuk dalam sebuah barisan atau organisasi supaya terdapat keteraturan dalam untuk mencapai tujuan. Disamping itu, dalam sebuah organisasi hendaknya terdapat pembagian wewenang dan tugas, sebagaimana yang terjadi dalam sebuah bangunan atau rumah, ada yang bertugas menjadi tangga, ada yang bertugas menjadi tiang, serta ada yang bertugas menjadi atap dan sebagainya.

Dalam hadits juga diterangkan:

“Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kita untuk berbuat yang optimal dalam segala sesuatu....”(HR Muslim)

Dalam menerima delegasi wewenang dan tanggung jawab hendaknya dilakukan dengan optimal dan sungguh-sungguh. Janganlah anggota suatu organisasi melakukan tugas dan wewenangnya dengan asal-asalan. Dalam sebuah hadits diterangkan bahwa apabila seseorang hanya mementingkan kepentingan sepihak dan melakukan tugas serta tanggung jawabnya dengan asal-asalan. Jadi dalam sebuah organisasi harus terjadi koordinasi yang baik dan tidak boleh terjadi penyalahgunaan wewenang. Kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau dikenal dengan desentralisasi ini diharapkan menghasilkan dua manfaat yaitu mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi masing-masing daerah.

Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah agar selalu senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintahan tersebut. Pada sektor pemerintahan, kinerja dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai oleh pegawai pemerintah atau instansi

pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode (Bastian, 2006).

Menurut Mulyadi (2001), banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja manajerial SKPD antara lain ketepatan skedul penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian intern, gaya kepemimpinan dan stuktur desentralisasi. Menurut Miah dan Mia dalam Karyanti (2010), dengan adanya desentralisasi, organisasi mampu mengembangkan kemampuan yang dimiliki, bisa menangani peristiwa-peristiwa, bertindak tanpa menunggu dan meningkatkan kualitas keputusan yang mendorong ke kinerja yang lebih baik.

Desentralisasi akan menunjukkan tingkat otonomi yang didelegasikan pada SKPD sehingga SKPD mempunyai tanggung jawab yang lebih besar terhadap perencanaan dan pengendalian aktivitas operasi serta membutuhkan informasi yang lebih banyak. Jadi organisasi yang lebih terdesentralisasi seperti pelaksanaan otonomi di Indonesia, maka SKPD mempunyai otonomi yang lebih besar dalam proses pengambilan atau penetapan keputusan. Dengan demikian desentralisasi akan membuat tanggung jawab yang lebih besar kepada manajerial SKPD dalam melaksanakan tugasnya, serta memberikan kebebasan dalam bertindak. Dengan desentralisasi akan meningkatkan independensi manajerial SKPD dalam berfikir dan bertindak dalam satu tim tanpa mengorbankan kebutuhan organisasi. Desentralisasi membutuhkan keseimbangan

manajerial SKPD yang independen dengan timnya dan komitmennya pada organisasi.

Selain itu, sistem pengendalian organisasi pada pemerintahan juga sangat diperlukan guna mendapatkan kinerja aparat pemerintah yang baik (Putri, 2013). Pelaksanaan sistem pengendalian intern seharusnya bertumpu pada penguatan sistem pengendalian yang sudah terbangun dan dilaksanakan oleh seluruh aktor dalam organisasi mulai dari adanya kebijakan, pembentukan organisasi, penyiapan anggaran, sarana dan prasarana, penetapan personil yang melaksanakan, penetapan prosedur dan review pada seluruh tahapan pembangunan (Aren dalam Putri, 2013). Menurut Rosdiana dalam Putri (2013), diharapkan dengan sistem pengendalian intern yang efektif akan berpengaruh terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah.

Menurut Siagian (2002), salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi yaitu komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan tingkat sejauhmana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu. Apabila setiap pegawai memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan prestasi terbaik baik masyarakat, maka tentunya kinerja sektor publik akan meningkat (Mahmudi, 2007).

Dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan penerimaan dalam jumlah yang cukup. Hal ini dikarenakan jumlah penerimaan yang direncanakan akan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah tahun berkenaan terutama pengeluaran daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berjalan dan belanja-belanja wajib lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Hal ini dapat dipahami karena apabila target penerimaan dalam tahun berjalan tidak dapat tercapai akan dapat berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan belanja daerah secara keseluruhan yang pada akhirnya dapat menimbulkan persoalan-persoalan yang lebih kompleks.

Adapun realisasi pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2014 secara keseluruhan sejumlah Rp 1.277.145.669.695,- atau dapat tercapai 101,42% dari yang direncanakan sejumlah Rp 1.259.212.601.746,-. Realisasi pendapatan daerah tersebut mencakup:

- a. Pendapatan asli Daerah terealisasi sejumlah Rp 175.319.364.867,- atau 138,33% dari yang direncanakan sejumlah Rp 126.737.232.802,-
- b. Dana Perimbangan teeralisasi sejumlah Rp 824.656.337.009,- atau 101,50% dari yang direncanakan sejumlah Rp 812.486.954.944,-

- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah terealisasi sejumlah Rp 277.169.968.089,- atau 86,62% dari yang direncanakan sejumlah Rp 319.988.414.000,-

Berdasarkan ketentuan pasal 20 peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Dalam menyusun APBD dapat terjadi defisit atau surplus anggaran. Defisit anggaran terjadi apabila jumlah pendapatan daerah lebih kecil dari jumlah anggaran belanja Daerah, dan sebaliknya surplus anggaran terjadi apabila jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah belanja daerah. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau sebaliknya memanfaatkan surplus anggaran daerah.

Realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Wonosobo dalam tahun 2014 terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 297.208.756.864,- atau 100,02% dari yang direncanakan sejumlah Rp 297.157.825.674,- meliputi sisa Lebih Perhitungan anggaran tahun 2013 sejumlah Rp 297.208.756.864,- dan penerimaan piutang sejumlah Rp 50.931.190,-
- b. Pengeluaran pembiayaan terealisasi sejumlah Rp 26.263.969.000,- atau 84,01% dari yang direncanakan sejumlah Rp 31.263.969.000,-
Pengeluaran digunakan untuk pembentukan dana cadangan sejumlah Rp

7.000.000.000,- dan penyertaan modal daerah sejumlah Rp 19.263.969.000,-.

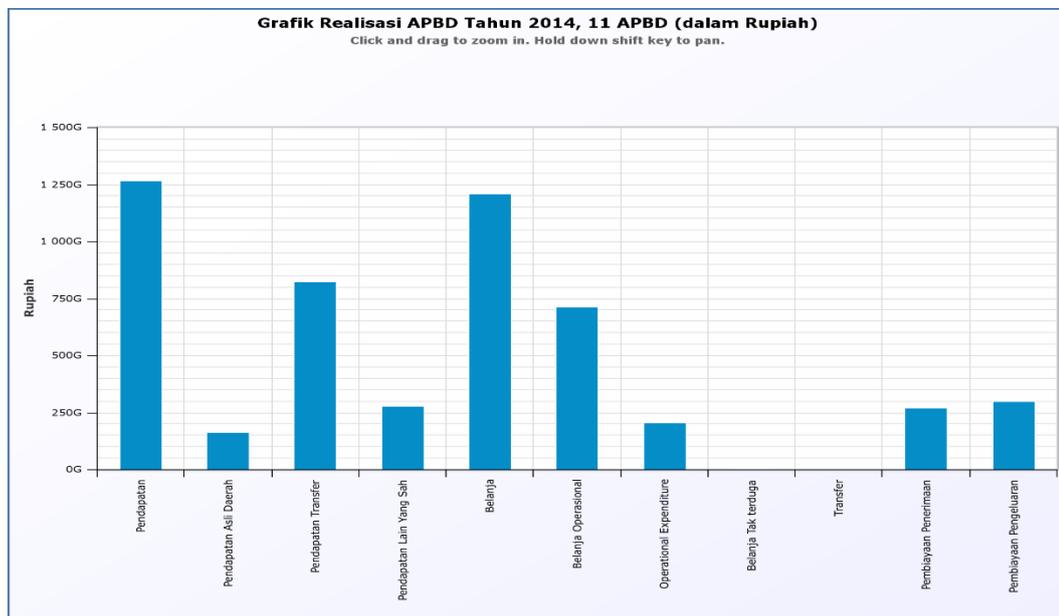
Realisasi APBD Kabupaten Wonosobo tahun 2011-2014 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Realisasi APBD (Rupiah) Kabupaten Wonosobo tahun 2011-2014

APBD	Realisasi APBD (Rupiah)			
	2014	2013	2012	2011
Pendapatan	1 265 479 915 960	1 144 182 522 600	1 031 047 909 020	979 682 252 013
Pendapatan Asli Daerah	163 653 610 867	108 729 508 524	82 335 296 457	67 697 977 209
Pendapatan Transfer	824 656 337 009	946 856 391 608	697 594 306 625	590 833 383 925
Pendapatan Lain Yang Sah	277 169 968 089	88596622463	251 118 305 939	321 450 890 879
Belanja	1 209 461 817 880	988 103 772 409	986 538 184 388	888 438 394 442
Belanja Operasional	710 674 985 778	848 084 965 677	795 101 151 789	767 806 153 464
Operational Expenditure	204 059 714 131	138 170 232 852	189 467 145 999	119 760 572 978
Belanja Tak terduga	2 470 971 000	1 848 573 880	1 969 886 600	871 668 000
Transfer	0	0	0	0
Pembiayaan Penerimaan	270 944 787 864	141 079 075 488	111 511 984 655	26 258 318 707
Pembiayaan Pengeluaran	297 208 756 864	156 079 075 488	117 573 984 655	35 704 318 707

Sumber: wonosobokab.bps.co.id, 2016

Sumber: wonosobokab.bps.co.id, 2016



Gambar 1.1.

Realisasi APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2014

Perbandingan capaian kinerja Kabupaten Wonosobo dalam tiga tahun terakhir diperlihatkan dalam tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2

Perbandingan capaian kinerja Kabupaten Wonosobo tahun 2012-2014

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN KINERJA (%)		
		2014	2013	2012
1	Penanggulangan Kemiskinan	78.25	81.80	97
2	Pendidikan	90.65	87.85	94.15
3	Kesehatan dan Keluarga Berencana	87.80	96	92.6
4	Infrastruktur	92.30	68.80	54.04
5	Pertanian dan Ketahanan Pangan	95.00	85.31	101.73
6	Konsolidasi dan Reformasi Birokrasi	131.17	101.42	103
7	Iklm dan Investasi Usaha	125.50	100	107.15
8	Energi dan Sumber Daya Mineral	66.50	59.50	59.25

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN KINERJA (%)		
		2014	2013	2012
9	Lingkungan hidup dan Penanggulangan Bencana	94.00	113	120.66
10	Kawasan Tertinggal, Terbelakang, Perbatasan dan Kumuh	121.80	113.50	106.5
11	Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi	45.00	91.70	72.4
CAPAIAN KINERJA RATA-RATA		93.45	90.80	91.68

Sumber: LAKIP Kabupaten Wonosobo, 2014

Dari hasil pengukuran kinerja Tahun 2014, dengan capaian kinerja rata-rata 93.45 persen, prioritas pembangunan yang capaian kerjanya masih dibawah capaian rata-rata perlu mendapat perhatian yang lebih serius dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar kinerja kedepan dapat ditingkatkan sehingga perlu terus ditingkatkan keselarasan antara program kegiatan yang dilaksanakan dengan target kinerja yang telah ditetapkan sehingga program kegiatan yang dilaksanakan memang benar-benar mempunyai daya dukung bagi pencapaian target kinerja.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan mengenai kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penelitian Afrida (2013), membuktikan bahwa desentralisasi dan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD. Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013) juga membuktikan bahwa komitmen organisasi dan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD. Penelitian Kurniawan (2011) membuktikan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari beberapa penelitian yaitu penelitian Afrida (2013) dan Putri (2013). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada obyek penelitiannya yaitu SKPD Kabupaten Wonosobo dan tahun penelitian yaitu tahun 2016.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Pengaruh Desentralisasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Survey pada SKPD Kabupaten Wonosobo)”**.

B. Batasan Masalah Penelitian

Atas pertimbangan minat, keterbatasan waktu, dan pengetahuan peneliti maka peneliti melakukan beberapa batasan masalah terhadap penelitian yang akan diteliti, yaitu peneliti membatasi masalah yang hanya dapat berkontribusi pada kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yaitu desentralisasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan komitmen organisasi serta penelitian ini hanya dilakukan di Kabupaten Wonosobo.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Apakah desentralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah?

- b. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah?
- c. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh desentralisasi terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- b. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- c. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, diantaranya:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya akuntansi sektor publik, akuntansi manajemen pemerintah daerah, dan diharapkan dapat

digunakan sebagai referensi bagi akademisi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, khususnya dalam hal kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah agar dapat lebih terus ditingkatkan.

2) Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi yang dibutuhkan para investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut.

3) Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur pengembangan perpustakaan perguruan tinggi.